

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis representasi Pemilu 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote* menggunakan pendekatan semiotika John Fiske. Film dokumenter *Dirty Vote* merepresentasikan Pemilu 2024 sebagai proses politik yang tidak netral dan sarat manipulasi kekuasaan. Representasi ini dibangun melalui narasi dan visual yang menampilkan dominasi Presiden Joko Widodo sebagai aktor kunci yang mengatur strategi kemenangan satu pasangan calon. Narasi tersebut menekankan adanya ketidaknetralan pejabat negara, politisasi bansos, dan intervensi sistematis terhadap institusi pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi.

Film ini menyembunyikan ideologi oligarki dibalik representasi Pemilu melalui narasi mengenai dominasi kekuasaan, *Dirty Vote* menyoroti bahwa Pemilu bukan lagi menjadi arena demokrasi yang bebas, tetapi telah dikuasai oleh elite politik yang memiliki kontrol atas institusi negara. Representasi ini menempatkan Jokowi sebagai simbol dari kekuasaan oligarkis yang bersifat “sultanistik”, di mana kekuasaan dipusatkan dan disalurkan melalui jaringan kekeluargaan serta elite ekonomi-politik.

Meskipun terindikasi mengandung elemen propaganda, film ini gagal mencapai tujuan transformasi politik yang lebih luas. Film ini hanya berhasil memperkuat opini kelompok yang sudah kritis terhadap pemerintah, tetapi

tidak mampu mengubah perilaku elektoral masyarakat secara signifikan. Bahkan, strategi propaganda dalam film ini justru mengalami efek sebaliknya (*backfire effect*), di mana tokoh yang dikritik mendapatkan visibilitas dan simpati lebih besar. Film ini tidak memberi alternatif konkret terhadap sistem yang dikritik, sehingga tidak mampu memicu perubahan sosial yang transformatif. Secara keseluruhan, *Dirty Vote* merupakan bentuk representasi visual dan ideologis yang mencoba membongkar manipulasi kekuasaan dalam Pemilu 2024, namun jatuh pada dilema propaganda yang gagal karena kurangnya strategi naratif yang transformatif dan tidak berhasil menjangkau khalayak luas secara efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya mulai menggali lebih dalam kemungkinan adanya unsur propaganda dalam film dokumenter *Dirty Vote*. Hal ini penting karena meskipun film dikemas dengan narasi hukum dan visual yang meyakinkan, tidak menutup kemungkinan bahwa film tersebut membawa agenda tertentu yang bersifat persuasif atau bahkan manipulatif. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis atau studi propaganda media, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi apakah *Dirty Vote* sekadar menyampaikan informasi atau turut berperan dalam membentuk opini publik secara terarah untuk tujuan politik tertentu.

Selain itu, pembuat film dokumenter juga perlu lebih memperhatikan prinsip keberimbangan informasi dan etika naratif dalam menyampaikan isu-isu politik. Narasi yang terlalu berat sebelah tanpa menghadirkan kontra opini dapat menimbulkan bias informasi yang mengarah pada agitasi atau pembentukan wacana tunggal. Film dokumenter yang mengangkat isu sensitif seperti Pemilu sebaiknya mampu menjadi ruang dialog yang sehat, bukan hanya sarana kampanye terselubung yang dikemas dalam bentuk visual dan simbolik yang kuat.

Bagi masyarakat dan pembuat kebijakan, penting untuk terus meningkatkan literasi media agar mampu membedakan antara dokumenter yang informatif dan yang bersifat propagandistik. Di era digital saat ini, batas antara informasi, opini, dan propaganda semakin kabur. Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap media visual seperti dokumenter menjadi sangat penting, agar publik tidak hanya menjadi konsumen narasi, tetapi juga subjek yang aktif dalam menafsirkan dan menilai pesan yang disampaikan.